

Analisis Kebijakan Publik dalam Penanganan Krisis Kesehatan: Studi Kasus Pandemi COVID-19 di Kabupaten Subang

Yanti¹

anengyanti023@gmail.com

Devira Novalisa Putri Utami²

dviranyptr@gmail.com

Yonathan Kurniawan³

anironyathan@gmail.com

Nicky P.A.⁴

Kasimnickypatriana93@gmail.com

Sugiyono⁵

sugiyono0362@gmail.com

Abstrak

Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, ekonomi, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan publik dalam penanganan krisis kesehatan di Kabupaten Subang selama pandemi COVID-19. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Subang menerapkan berbagai kebijakan, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), program vaksinasi massal, dan peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan. Meskipun kebijakan ini berhasil menurunkan laju infeksi dan meningkatkan cakupan vaksinasi, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi, dan resistensi masyarakat terhadap vaksinasi. Selain itu, distribusi layanan kesehatan yang tidak merata dan distribusi bantuan sosial yang kurang tepat sasaran juga menjadi hambatan dalam penanganan pandemi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan infrastruktur kesehatan, peningkatan edukasi dan komunikasi publik, penggunaan teknologi digital, dan peningkatan koordinasi antar lembaga sebagai langkah-langkah untuk memperbaiki penanganan krisis kesehatan di masa depan. Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, penyediaan bantuan ekonomi yang tepat sasaran, dan membangun kepercayaan publik melalui transparansi komunikasi. Penelitian ini juga memberikan saran untuk penelitian lanjutan, seperti studi komparatif dan analisis partisipasi publik, guna memperkaya pemahaman dan pengembangan kebijakan publik dalam penanganan krisis kesehatan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Krisis Kesehatan, Pandemi COVID-19, Kabupaten Subang, Penanganan Pandemi, Evaluasi Kebijakan, Transformasi Digital, Partisipasi Publik, Infrastruktur Kesehatan, Edukasi Publik.

Abstract

The COVID-19 pandemic has had a significant impact on various aspects of life, including health, economy, and society. This study aims to analyze public policy in handling the health crisis in Subang Regency during the COVID-19 pandemic. The research methodology employs a qualitative approach with descriptive analysis. Data were collected through in-depth interviews, observations, and policy documentation.

The results of the study indicate that the Subang Regency government implemented various policies such as Large-Scale Social Restrictions (PSBB), mass vaccination programs, and increased healthcare facility capacity. Although these policies successfully reduced the infection rate and increased vaccination coverage, several challenges were encountered, including limited resources, lack of coordination, and public resistance to vaccination. Additionally, unequal distribution of healthcare services and improper distribution of social assistance also hindered the pandemic response.

This study recommends strengthening healthcare infrastructure, enhancing public education and communication, utilizing digital technology, and improving inter-agency coordination as measures to improve health crisis management in the future. Practical implications of this study include training and development of human resources, providing targeted economic assistance, and building public trust through transparent communication. The study also offers suggestions for further research, such as comparative studies and public participation analysis, to enrich understanding and development of public policies in health crisis management.

Keywords: *Public Policy, Health Crisis, COVID-19 Pandemic, Subang Regency, Pandemic Response, Policy Evaluation, Digital Transformation, Public Participation, Healthcare Infrastructure, Public Education.*

1. Pendahuluan

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019 telah membawa dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, ekonomi, dan sosial. Di Indonesia, pemerintah pusat dan daerah menghadapi tantangan besar dalam mengendalikan penyebaran virus dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya. Kabupaten Subang, sebagai bagian dari wilayah Indonesia, juga mengalami krisis kesehatan yang serius akibat pandemi ini.

Penanganan krisis kesehatan memerlukan kebijakan publik yang efektif, cepat, dan responsif. Menurut teori kebijakan publik, kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting bagi masyarakat (Anderson, 1975). Dalam konteks pandemi, kebijakan publik yang baik harus mampu mengurangi penyebaran virus, menyediakan layanan kesehatan yang memadai, serta mendukung pemulihan ekonomi dan sosial.

Teori kebijakan publik, seperti yang dikemukakan oleh Anderson (1975), menekankan pentingnya perumusan dan implementasi kebijakan yang sesuai untuk mencapai tujuan publik yang diinginkan. Dalam situasi krisis, kebijakan publik perlu lebih fleksibel dan adaptif untuk merespons kondisi yang berubah dengan cepat.

Teori Krisis (*Crisis Theory*) juga relevan dalam konteks ini, yang menekankan bahwa krisis dapat terjadi secara tiba-tiba dan membutuhkan respon yang cepat serta terkoordinasi dari berbagai pihak (Rosenthal, Boin, & Comfort, 2001). Krisis kesehatan seperti pandemi COVID-

19 memerlukan penanganan yang segera untuk mengurangi dampak negatif yang lebih luas. *Crisis Theory* menggarisbawahi bahwa ketidakmampuan dalam merespons krisis dengan cepat dan efektif dapat memperburuk situasi dan menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.

Di Kabupaten Subang, kebijakan penanganan krisis kesehatan yang diterapkan mencakup berbagai aspek, mulai dari upaya pencegahan penyebaran virus, penyediaan layanan kesehatan yang memadai, hingga dukungan bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi dan sosial. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi laju penyebaran COVID-19 dan membantu masyarakat bertahan di tengah krisis.

Namun, penerapan kebijakan ini tidak tanpa tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan sumber daya, infrastruktur kesehatan yang belum memadai, serta resistensi masyarakat terhadap beberapa kebijakan yang diterapkan. Tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih inovatif dan inklusif, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Dalam konteks teori kebijakan publik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penanganan krisis kesehatan di Kabupaten Subang selama pandemi COVID-19. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami dinamika kebijakan publik dalam penanganan krisis kesehatan di era pandemi, serta memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih efektif dan responsif di masa depan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep dan Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting bagi masyarakat. Menurut Anderson (1975), kebijakan publik adalah "*a purposive course of action followed by government in dealing with some problem or matter of concern.*" Kebijakan publik mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan, yang semuanya penting dalam memastikan kebijakan tersebut efektif dan mencapai tujuannya.

Teori kebijakan publik seperti Model Tahapan (*Stages Model*) yang dikemukakan oleh Lasswell (1956) dan Brewer (1974) menjelaskan bahwa kebijakan publik melalui beberapa tahap, yakni perumusan masalah, penetapan agenda, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Dalam konteks krisis kesehatan, setiap tahap tersebut harus dilakukan dengan cepat dan tepat untuk mengatasi masalah yang ada.

2.2 Kebijakan Publik dalam Penanganan Krisis Kesehatan

Penanganan krisis kesehatan memerlukan kebijakan yang adaptif dan responsif. Teori Manajemen Krisis (*Crisis Management Theory*) oleh Rosenthal, Boin, dan Comfort (2001) menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara berbagai pihak dalam menghadapi krisis. Kebijakan yang diterapkan harus mampu mengurangi dampak negatif dan mempercepat pemulihan.

Dalam konteks pandemi COVID-19, kebijakan kesehatan publik mencakup berbagai tindakan seperti pembatasan sosial, pengujian massal, pelacakan kontak, dan vaksinasi. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat dan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Penelitian oleh Ansell, Boin, dan Keller (2010) menunjukkan bahwa kebijakan krisis yang sukses sering kali melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk komunikasi yang cepat dan tepat.

2.3 Pandemi COVID-19: Tantangan Global dan Lokal

Pandemi COVID-19 telah menjadi tantangan global yang mempengaruhi semua negara, baik maju maupun berkembang. Setiap negara menghadapi tantangan yang unik dalam menanggapi pandemi ini, termasuk ketersediaan sumber daya, infrastruktur kesehatan, dan respons masyarakat.

Di tingkat lokal, seperti di Kabupaten Subang, tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan fasilitas kesehatan, distribusi vaksin yang tidak merata, dan masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Menurut teori Ekologi Sosial (Bronfenbrenner, 1979), krisis seperti pandemi mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat dan membutuhkan pendekatan *multidimensional* untuk penanganannya.

2.4 Studi Kasus Penanganan Pandemi di Berbagai Daerah

Studi kasus dari berbagai daerah memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kebijakan publik dapat diterapkan secara efektif dalam konteks yang berbeda. Misalnya, Korea Selatan berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19 melalui pengujian massal dan pelacakan kontak yang efektif (Moon, 2020). Sementara itu, Selandia Baru menerapkan pembatasan ketat dan strategi eliminasi yang berhasil (Baker et al., 2020).

Studi kasus ini menunjukkan bahwa strategi yang sukses sering kali melibatkan kebijakan yang berbasis data, kepemimpinan yang kuat, dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Di Indonesia, beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat telah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan berbagai tingkat keberhasilan.

2.5 Kerangka Analisis Kebijakan Publik

Kerangka analisis kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Model Analisis Kebijakan oleh Dunn (2004), yang mencakup lima tahap utama: penentuan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Model ini membantu dalam memahami bagaimana kebijakan publik dirumuskan, diterapkan, dan dievaluasi dalam konteks penanganan krisis kesehatan.

Model lainnya yang relevan adalah Framework for Analyzing Public Policies oleh Sabatier dan Weible (2007), yang menekankan pentingnya jaringan aktor, konteks institusional, dan dinamika politik dalam proses kebijakan. Dengan menggunakan kerangka analisis ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan publik di Kabupaten Subang dalam penanganan krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.

Melalui tinjauan pustaka ini, penelitian ini berupaya memberikan landasan teoritis yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang dinamika kebijakan publik dalam konteks penanganan krisis kesehatan, khususnya di Kabupaten Subang.

3. Metodologi Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena kebijakan publik dalam penanganan krisis kesehatan di Kabupaten Subang selama pandemi COVID-19. Desain studi kasus digunakan untuk memahami konteks spesifik dan dinamika kebijakan yang diterapkan, serta interaksi antara berbagai aktor yang terlibat (Yin, 2003).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Indonesia. Lokasi ini dipilih karena Subang merupakan daerah yang mengalami dampak signifikan dari pandemi COVID-19 dan memiliki berbagai kebijakan yang diterapkan untuk penanganan krisis kesehatan. Penelitian dilakukan selama periode Januari hingga Juni 2024, mencakup analisis kebijakan yang diterapkan sejak awal pandemi hingga saat ini.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder:

- **Data Primer:** Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan perwakilan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai kebijakan yang diterapkan dan tantangan yang dihadapi.
- **Data Sekunder:** Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan media, jurnal akademik, dan literatur terkait lainnya. Data ini digunakan untuk melengkapi dan mengkonfirmasi temuan dari data primer, serta memberikan konteks yang lebih luas mengenai kebijakan penanganan krisis kesehatan di Subang.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- **Wawancara Mendalam (*In-Depth Interviews*):** Wawancara dilakukan dengan pejabat pemerintah, tenaga kesehatan, dan anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait kebijakan penanganan pandemi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas dalam eksplorasi topik yang relevan (Kvale, 1996).
- **Observasi Partisipatif (*Participant Observation*):** Peneliti melakukan observasi langsung di lapangan untuk memahami implementasi kebijakan dan respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Observasi ini membantu dalam mendapatkan gambaran yang lebih holistik tentang dinamika di lapangan.
- **Dokumentasi (*Documentation*):** Peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen kebijakan, laporan pemerintah, artikel media, dan literatur akademik terkait kebijakan penanganan pandemi di Subang. Teknik ini membantu dalam mengidentifikasi kebijakan yang diterapkan dan mengevaluasi efektivitasnya.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik (*Thematic Analysis*) yang dikemukakan oleh Braun dan Clarke (2006). Proses analisis meliputi beberapa tahap berikut:

- **Pengumpulan Data:** Mengumpulkan semua data dari berbagai sumber.
- **Pengkodean (*Coding*):** Menyusun kode-kode untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari data yang diperoleh.
- **Identifikasi Tema (*Theme Identification*):** Mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang telah dikodekan.
- **Analisis Tematik (*Thematic Analysis*):** Menganalisis tema-tema tersebut untuk memahami dinamika kebijakan publik dalam penanganan krisis kesehatan di Kabupaten Subang.
- **Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*):** Menarik kesimpulan dari temuan-temuan yang diperoleh dan mengaitkannya dengan teori-teori kebijakan publik dan krisis.

Dengan menggunakan metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kebijakan publik dalam penanganan krisis kesehatan di Kabupaten Subang selama pandemi COVID-19, serta menawarkan rekomendasi yang bermanfaat bagi kebijakan di masa mendatang.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Subang

Kabupaten Subang terletak di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Daerah ini memiliki beragam potensi ekonomi, mulai dari pertanian, industri, hingga pariwisata. Dengan populasi yang cukup padat, Subang menghadapi tantangan dalam menyediakan layanan publik yang memadai, termasuk layanan kesehatan. Infrastruktur kesehatan di Subang mencakup beberapa rumah sakit, puskesmas, dan klinik, namun masih terdapat kesenjangan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil.

4.2 Kronologi dan Dampak Pandemi COVID-19 di Kabupaten Subang

Pandemi COVID-19 pertama kali terdeteksi di Indonesia pada awal 2020 dan segera menyebar ke berbagai daerah, termasuk Kabupaten Subang. Dampak pandemi di Subang sangat signifikan, meliputi peningkatan jumlah kasus infeksi, kematian, serta tekanan terhadap sistem kesehatan dan ekonomi. Berdasarkan teori Dampak Sosial (*Social Impact Theory*), pandemi tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik masyarakat tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang luas (Latane, 1981).

4.3 Kebijakan Publik yang Diterapkan di Kabupaten Subang

Untuk mengatasi pandemi, pemerintah Kabupaten Subang menerapkan berbagai kebijakan publik yang mencakup langkah-langkah pencegahan, penanganan medis, serta dukungan ekonomi dan sosial. Beberapa kebijakan utama yang diterapkan antara lain:

- **Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB):** Dilaksanakan untuk mengurangi mobilitas masyarakat dan menekan laju penyebaran virus.
- **Program Vaksinasi Massal:** Ditujukan untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity).
- **Peningkatan Kapasitas Fasilitas Kesehatan:** Meliputi penambahan tempat tidur di rumah sakit dan pembangunan rumah sakit darurat.
- **Bantuan Sosial dan Ekonomi:** Diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi untuk mengurangi beban ekonomi.

Menurut teori Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation Theory*), keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada koordinasi, komunikasi, dan dukungan sumber daya yang memadai (Pressman & Wildavsky, 1973).

4.4 Evaluasi Kebijakan Publik: Keberhasilan dan Kegagalan

Evaluasi kebijakan publik di Kabupaten Subang menunjukkan adanya keberhasilan dan kegagalan dalam penanganan pandemi. Beberapa keberhasilan yang dicatat meliputi:

- **Penurunan Laju Infeksi:** Kebijakan PSBB berhasil menurunkan laju infeksi pada periode tertentu.
- **Cakupan Vaksinasi yang Meningkat:** Program vaksinasi massal mencapai banyak masyarakat, mengurangi risiko penyebaran virus.

Namun, terdapat pula beberapa kegagalan, antara lain:

- **Ketidakseimbangan Distribusi Layanan Kesehatan:** Masih terdapat kesenjangan dalam akses layanan kesehatan di daerah terpencil.
- **Resistensi Masyarakat terhadap Vaksinasi:** Sebagian masyarakat menunjukkan resistensi terhadap vaksinasi, menghambat upaya mencapai kekebalan kelompok.
- **Bantuan Sosial yang Tidak Merata:** Distribusi bantuan sosial tidak merata dan terkadang tidak tepat sasaran, menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

4.5 Analisis Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan penanganan COVID-19 di Kabupaten Subang menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- **Keterbatasan Sumber Daya:** Baik sumber daya manusia maupun materi yang tidak memadai menghambat pelaksanaan kebijakan secara efektif.
- **Kurangnya Koordinasi:** Koordinasi antara pemerintah daerah, pusat, dan instansi terkait seringkali tidak optimal, menyebabkan ketidakefisienan.
- **Resistensi Masyarakat:** Kurangnya kesadaran dan edukasi di kalangan masyarakat menyebabkan resistensi terhadap kebijakan yang diterapkan, seperti vaksinasi dan PSBB.

Menurut teori Manajemen Krisis (*Crisis Management Theory*), tantangan dalam implementasi kebijakan krisis dapat diatasi dengan meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan adaptabilitas (Boin, Hart, Stern, & Sundelius, 2005).

4.6 Peluang dan Strategi Perbaikan Kebijakan di Masa Depan

Dalam menghadapi pandemi di masa depan, beberapa peluang dan strategi perbaikan kebijakan yang dapat diterapkan di Kabupaten Subang antara lain:

- **Pemanfaatan Teknologi Digital:** Menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan kesehatan dan komunikasi publik.
- **Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan:** Melatih tenaga kesehatan dan petugas lapangan untuk lebih siap menghadapi krisis kesehatan.
- **Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Masyarakat:** Meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat untuk memperkuat respons terhadap pandemi.

Teori Penguatan Kebijakan (*Policy Strengthening Theory*) menyarankan bahwa kebijakan yang kuat dan efektif membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, peningkatan kapasitas, dan adaptasi yang berkelanjutan terhadap perubahan kondisi (Sabatier & Weible, 2007).

Melalui analisis hasil dan pembahasan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai kebijakan publik dalam penanganan krisis kesehatan di Kabupaten Subang dan menawarkan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan kebijakan di masa depan.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis kebijakan publik dalam penanganan krisis kesehatan, khususnya pandemi COVID-19, di Kabupaten Subang. Dari penelitian ini, beberapa kesimpulan utama dapat diambil:

- **Implementasi Kebijakan:** Kabupaten Subang telah menerapkan berbagai kebijakan publik untuk mengatasi pandemi, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), program vaksinasi massal, dan peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan.
- **Keberhasilan dan Kegagalan:** Kebijakan tersebut memiliki keberhasilan dalam menurunkan laju infeksi dan meningkatkan cakupan vaksinasi, namun juga menghadapi kegagalan dalam distribusi layanan kesehatan yang merata dan resistensi masyarakat terhadap vaksinasi.
- **Tantangan:** Tantangan utama dalam implementasi kebijakan meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antara pihak terkait, dan resistensi masyarakat.
- **Peluang:** Transformasi digital dan peningkatan kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat menawarkan peluang untuk memperbaiki penanganan krisis kesehatan di masa depan.

Menurut teori Manajemen Krisis (*Crisis Management Theory*), respon yang efektif terhadap krisis memerlukan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, dan adaptasi cepat terhadap perubahan situasi (Boin, Hart, Stern, & Sundelius, 2005).

5.2 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Subang antara lain:

- **Penguatan Infrastruktur Kesehatan:** Meningkatkan kapasitas dan kualitas fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil, untuk memastikan akses yang merata.
- **Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Publik:** Mengadakan kampanye edukasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan kesehatan, termasuk vaksinasi.
- **Penggunaan Teknologi Digital:** Mengimplementasikan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan, seperti telemedicine, untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan.
- **Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga:** Memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan instansi terkait untuk memastikan implementasi kebijakan yang lebih terkoordinasi dan efisien.

Menurut teori Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation Theory*), keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan eksekusi, serta dukungan sumber daya yang memadai (Pressman & Wildavsky, 1973).

5.3 Implikasi Praktis

Beberapa implikasi praktis dari penelitian ini meliputi:

- **Pelatihan dan Pengembangan SDM:** Pelatihan yang berkelanjutan bagi tenaga kesehatan dan petugas lapangan untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi krisis kesehatan.
- **Penyediaan Bantuan Ekonomi:** Distribusi bantuan ekonomi yang lebih tepat sasaran untuk membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi.
- **Membangun Kepercayaan Publik:** Transparansi dalam komunikasi dan pelaporan data terkait penanganan pandemi untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Teori New Public Management (NPM) menekankan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang responsif dalam pengelolaan sektor publik (Hood, 1991).

5.4 Saran untuk Penelitian Lanjutan

Untuk penelitian lanjutan, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

- **Penelitian Komparatif:** Melakukan penelitian komparatif antara Kabupaten Subang dengan daerah lain untuk memahami variasi dalam penanganan krisis kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan.
- **Studi Longitudinal:** Melakukan studi longitudinal untuk mengamati perubahan dan perkembangan kebijakan kesehatan dari waktu ke waktu dan dampaknya terhadap masyarakat.

- **Analisis Partisipasi Publik:** Menganalisis peran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan untuk meningkatkan responsivitas dan efektivitas kebijakan.

Menurut teori Partisipasi Publik (*Public Participation Theory*), partisipasi aktif masyarakat dalam proses kebijakan dapat meningkatkan legitimasi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan (Arnstein, 1969).

Dengan kesimpulan, rekomendasi, implikasi praktis, dan saran penelitian lanjutan yang jelas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan publik untuk penanganan krisis kesehatan, khususnya dalam konteks pandemi COVID-19 di Kabupaten Subang.

Daftar Pustaka

- Anderson, J. E. (1975). *Public Policy-Making*. New York: Praeger.
- Anwar, S. N. (2020). *Analisis Kebijakan Penanganan COVID-19 di Indonesia*. Medan: USU Press.
- Boin, A. ' (2005). *The Politics of Crisis Management: Public Leadership under Pressure*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dunn, W. N. (2016). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. New York: Routledge.
- Hidayat, R. &. (2020). Dampak Ekonomi dan Sosial Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 28(1), 15-30.
- Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons? . *Public Administration*, 69(1), 3-19.
- Howlett, M. R. (2009). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems (3rd ed.)*. Oxford: Oxford University Press.
- Indonesia, K. K. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Nurmandi, A. &. (2020). Digital Governance in Combating COVID-19 in Indonesia: A Case Study of Surabaya. *Journal of Governance*, 5(2), 123-134.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
- Pressman, J. L. (1973). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*. Berkeley: University of California Press.

- Rahmatullah, I. (2020). Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(2), 87-101.
- Rosenthal, U. B. (2001). *Managing Crises: Threats, Dilemmas, Opportunities*. Illinois: Springfield, IL: Charles C. Thomas Publisher.
- Sabatier, P. A. (2007). *Theories of the Policy Process*. Colorado: Boulder, CO: Westview Press.
- Sandfort, J. &. (2015). *Effective Implementation in Practice: Integrating Public Policy and Management*. San Francisco: San Francisco: Jossey-Bass.
- Santoso, B. (2020). Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45-58.
- Subang, B. P. (2021). *Statistik Daerah Kabupaten Subang 2021*. Subang: BPS Kabupaten Subang.
- Weiss, C. H. (1979). The Many Meanings of Research Utilization. *Public Administration Review*, 39(5), 426-431.
- WHO. (2020). *Responding to community spread of COVID-19: Interim guidance*. Retrieved from Retrieved from WHO website.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.)*. Los Angeles: SAGE Publications.